



LAPORAN RESES
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 / 2025
17 s/d 24 NOVEMBER 2024

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
SENIN, 30 DESEMBER 2024

Dibacakan Oleh:
HAFIDZ ALHAQ FATIH, S.T, M.Sc

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang Kami Hormati, Gubernur Jawa Tengah

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran Eksekutif, Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia

Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Reses Masa Persidangan I tahun sidang 2024/2025 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah kami laksanakan pada tanggal 17 s/d 24 November 2024 berlokasi di daerah pemilihan se-Jawa Tengah.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam Reses Tahun Sidang 2024 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan agenda Reses di 11 daerah pemilihan:

1. Kota Semarang oleh Saudara H. Muhammad Afif, Lc
2. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal oleh Saudara H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I;
3. Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang oleh Saudari Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd

4. Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora dilaksanakan oleh Saudara Hafidz Alhaq Fatih, S.T;
5. Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen oleh Saudara H. Dedy Endriyatno;
6. Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta oleh Saudara Martono, S.Pd, M.Si;
7. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang oleh Saudara H Tugiman, S.P;
8. Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga oleh Saudara H. Karsono, S.Pd.I;
9. Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap oleh Saudara Setyo Arinugroho, S.H;
10. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan oleh saudara Much. Muchis Ariston, S.T;
11. Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo oleh saudara Amir Masduki, S.Pd.I;

Hadirin Yang Kami Hormati

Adapun aspirasi, masukan, saran temuan selama kegiatan reses secara khusus di antaranya sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa inflasi di bulan November mengalami kenaikan yaitu dari bulan oktober 0,19% naik menjadi 0,26% di bulan November, walaupun masih rendah di banding dengan inflasi nasional sekitar 0,30%. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan harga komoditi bawang merah, dimana mulai bulan September sudah memasuki musim penghujan yang mengakibatkan produksi bawang merah menurun. Kenaikan komoditi ini sudah mulai sejak awal September dengan perbandingan dengan harga di bulan Agustus yang begitu rendah.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi instansi terkait, bahwa hortikultura ini mengalami fluktuasi luar biasa. Kadang turun kadang naik, sehingga memberikan andil inflasi maupun deflasi pada bulan-bulan tersebut. Diperlukan kolaborasi antar instansi baik pertanian, perdagangan dan instansi terkait supaya tata kelola dari produk pertanian khususnya diperhatikan untuk bisa stabil dan tidak merugikan baik petani maupun konsumen (masyarakat).

2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah juga mencatat bahwa terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut. Ini menandakan bahwa sedang terjadi permasalahan terkait daya beli masyarakat yang semakin menurun. Harus ada kebijakan yang baik dimana pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan pada UMKM. Salah satu bentuknya dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra MIkro (UMI). Dan sampai dengan 30 November 2024 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp. 46,27 Triliun (tumbuh 19,26%) dengan total sebanyak 911.686 debitur. Harapan kami program ini terus digulirkan untuk memacu pergerakan ekonomi dalam masyarakat.
3. Jawa Tengah telah memasuki musim penghujan, dimana perlu di persiapkan hal-hal yang bisa membantu masyarakat di daerah yang potensi bencana. Salah satunya adalah kondisi rob dan air hujan yang bersatu sehingga sungai tidak bisa menampung volume air yang ada. Tepatnya beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Banjir juga meluas hingga pedukuhan Pasirsari, Kelurahan Pasir Kraton Kramat dengan tinggi air mencapai 1 meter. Hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi dengan baik manakala pemerintah fokus melakukan perbaikan dan perawatan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti halnya tanggul sungai yang menjadi penahan

luapan air di sungai. Dikarenakan jebolnya tanggul DAS Brengi-Meduri maka tercatat 89 orang mengungsi. Sebagaimana informasi dari warga Pasirsari yang mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan banjir terparah, bila dibandingkan kemarin. Aktivitas warga yang sebagian besarambatik, lumpuh total akibat banjir kiriman tersebut. Sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian daerah sekitar. Pemerintah provinsi perlu melakukan Langkah-langkah strategis guna memberikan solusi yang terbaik dan terukur serta jelas tahapan-tahapan penanganannya, karena permasalahan terjadinya bencana tersebut sudah diketahui penyebabnya.

4. Di beberapa daerah rawan bencana terjadi tanah longsor maupun banjir, bahkan sampai membuat putusnya jembatan sebagai penghubung daerah satu dengan lainnya. Sebagaimana terjadi di Banjarnegara tepatnya di Desa Karangtengah dimana jembatan putus karena diterjang arus sungai yang sangat deras dan membanjiri daerah sekitar. Dengan putusnya akses penghubung dua kecamatan tersebut maka masyarakat harus memutar hingga 15 km guna melakukan aktivitasnya. Serta di beberapa daerah masih banyak lagi kejadian serupa dimana jembatan putus dan membuat masyarakat harus menempuh lebih jauh guna melakukan aktivitasnya. Perlu perhatian yang serius dari pemerintah guna melakukan penanganan supaya masyarakat bisa melewati jembatan yang putus tersebut.
5. Sumber daya manusia di Jawa Tengah sangat melimpah dan angka pengangguran tercatat semakin menurun. BPS mencatat jumlah Angkatan kerja di Jawa Tengah per agustus 2024 tercatat mencapai 21,91 juta orang. Sementara jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 20,86 juta orang. Dari jumlah tersebut ada 12,44 juta

orang bekerja di sektor informal. Postur Angkatan kerja diatas masih didominasi angkatan kerja di sektor formal. Yang menjadi keprihatinan kita adalah angka pemutusan kerja di Jawa Tengah cukup tinggi. Disnakertrans Jateng memberikan data bahwa ada 7.437 pekerja di PHK pada tahun 2024. Bahkan ada ancaman PHK selanjutnya sebagai dampak pailit PT. Sritek dan tercatat ada kurang lebih ada 10 ribuan pekerja yang terancam PHK. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang cukup strategis dari pemerintah untuk membantu supaya tidak terjadi PHK dan diperlukan sosialisasi kembali kepada masyarakat berkaitan peluang kerja yang ada di beberapa Kawasan industri baik di Kendal, Batang, dan Kota Semarang yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.

6. Jawa Tengah sudah semestinya menjadi provinsi paling makmur, karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Tetapi persoalan seperti pupuk, bibit, mahalnya operasional hingga ketidakjelasan penjualan produk pertanian menyebabkan pendapatan petani masih begitu minim dan jauh dari kata sejahtera di Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pertanian saat ini belum menguntungkan petani. Hal tersebut menjadi aduan dari warga Kecamatan Tawangsari dan sekitarnya di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu Pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah tersebut. Pupuk harus tercukupi. Saat panen, ada kepastian hasil pertanian dibeli oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan. Kalau seperti itu, maka regenerasi petani akan berjalan. Langkah penyelesaian Pemerintah haruslah konkret dan tidak mempersulit masyarakat. Dalam penjaminan kesejahteraan misalnya, masyarakat tak perlu dipersulit dengan prosedur bantuan yang berbelit-belit. Yang

masyarakat harapkan adalah solusi konkrit, bukan janji jaminan kesejahteraan dengan prosedur yang berbelit-belit.

7. Reformasi birokrasi harus terus didorong guna menjadikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah digitalisasi arsip di semua level pemerintahan. Digitalisasi arsip sangat mendukung kinerja dari pemerintah karena bentuknya cukup efektif dan efisien serta tidak membutuhkan banyak tempat. Keterbutuhan arsip secara digital dapat memudahkan pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi baik secara kerja maupun dalam pencatatan asset daerah di Provinsi Jawa Tengah.
8. Kendati telah melewati pro-kontra selama dua tahun, Pemerintah bersikukuh tetap akan memberlakukan kebijakan PIT berbasis kuota pada 1 Januari 2024 mendatang. Salah seorang nelayan di Tegal menyuarakan aspirasinya untuk menolak kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) karena kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan para pemilik modal besar. Kebijakan ini untuk siapa dan siapa yang diuntungkan, karena ada kuota yang berbayar. Siapa yang mampu bayar, maka dia bisa menikmati laut. Kebijakan PIT ini mencekik nelayan, menyulitkan nelayan dengan pembagian kuota, rumitnya perizinan dan pembayaran PNBP pasca produksi, hingga kewajiban pemasangan VMS yang seluruhnya tidak dibarengi dengan penjelasan dan pendampingan. Pemerintah jangan asal menerbitkan peraturan tanpa mempertimbangkan efek bagi lapisan terbawah. Pemerintah memang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang mencakup hajat hidup orang banyak oleh UUD 1945, namun bukan berarti tidak

memperhatikan kondisi nelayan. Kebijakan PIT seyogyanya perlu diimbangi dengan pemenuhan fasilitas pendukung kesejahteraan nelayan.

9. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak, kedaulatan pangan jelas tak hanya menyangkut soal ketersediaan pangan yang bermutu dan bergizi. Pemerintah tentunya perlu memberikan jaminan keamanan produk dari bahan-bahan non-halal yang dilarang dalam agama Islam. Maka perlu kita pastikan ketersediaan dan penjaminannya. Lebih jauh lagi, jaminan produk halal ini turut mendukung tumbuhnya ekonomi syariah bila kita hubungkan dengan ketahanan ekonomi bahkan investasi. Jaminan produk halal tidak boleh disederhanakan/disepelekan. Namun lisensi keamanan dan kehalalan produknya perlu terus dipermudah bagi seluruh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Jaminan produk halal ini tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh disepelekan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah, akses lisensi halal untuk usaha kecil menengah, UKM harus terus dipermudah. Sementara itu, Ketahanan pangan dengan jaminan produk halal tidak dapat tercapai dengan sendirinya. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Selain melibatkan Dinas Urusan Pangan dan lembaga terkait, sinergi dan kolaborasi juga perlu dilakukan dengan lembaga yang menyediakan dukungan penjaminan, pembiayaan, baik dari sektor pemerintah, swasta, LSM, hingga media massa dan penyiaran.
10. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan fakta bahwa lahan pertanian di Kabupaten Demak semakin berkurang dari tahun ke tahun. Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Demak mengalami penurunan sekitar 13,60 persen atau 20.006 unit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain itu Rumah Tangga Usaha Pertanian

(RTUP) juga mengalami penurunan sebanyak 4,4 persen atau 125.659 rumah tangga. Hal tersebut disebabkan lantaran masifnya pengurangan lahan akibat pembangunan jalan tol, pabrik, dan perumahan. Tak sekedar pengurangan lahan, pembangunan tersebut nyatanya juga menimbulkan penurunan permukaan lahan hingga timbul genangan rob di area yang tak ditanggul. Masalah tersebut merupakan ironi. Bukan tanpa alasan, 10 Tahun lalu, Kabupaten Demak diandalkan sebagai daerah penyangga pangan nomor 2 di Jawa Tengah. Sekarang, petani dan pelaku usaha pertanian terpaksa menyerah dengan keadaan. Lahan yang tergenang rob banyak ditinggalkan begitu saja. Perlu adanya sinergisitas antara Dinas Pertanian Provinsi dan Daerah hingga Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BPP) untuk melakukan pendampingan terkait revitalisasi lahan pertanian yang ditinggalkan. Solusi penanganan masalah pertanian di Kabupaten Demak ini sejatinya perlu diselesaikan secara komprehensif atau menyeluruh. Masalah pertanian di Demak begitu kompleks karena pemicu dan penyebabnya juga tak sedikit. Selain revitalisasi yang harus digencarkan, pembangunan tanggul laut tak bisa setengah-setengah, harus menyeluruh. Kemudian perlu kiranya penanaman mangrove sebagai penyangga proteksi tanggul.

Demikianlah beberapa hal yang menjadi masukan, temuan selama masa Reses anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami harap Saudara Gubernur bisa memperhatikan serta menindaklanjutinya. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

H. MUHAMMAD AFIF, Lc
KETUA



ttd

H. SURURUL FUAD, Lc, M.E.I
SEKRETARIS